

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 - 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmatNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Nganjuk yang sehat baik secara fisik, mental, sosial dan ekonomi.

Demikian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023, agar dapat digunakan dengan sebaik – baiknya dan disampaikan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan, semoga dapat digunakan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan Rencana Strategis dimasa yang akan datang.

Nganjuk, 02 September 2019
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Nganjuk

Drh. BUDI SUTJAHJONO, SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620406 199202 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan.....	5
BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan..	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2 Sumber Daya	15
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	15
2.2.2 Sarana dan Prasarana	16
2.3 Kinerja Pelayanan.....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	28
BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	33
3.3 Program Unggulan Nganjuk Nyawiji 2018-2023	35
3.4 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur	35
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB IV Tujuan dan Sasaran	39
4.1 Tujuan	39
4.2 Sasaran.....	39
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	44
5.1 Strategi	44
5.2 Kebijakan	46
BAB VI Program dan Rencana Kegiatan.....	49
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan	59
7.1 Indikator Kinerja Utama	59
7.2 Indikator Kinerja Kunci	59
BAB VIII Penutup	64

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	15
Tabel II.2	Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel II.3	Daftar Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2017	18
Tabel II.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk.....	20
Tabel II.3.2	Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk	21
Tabel II.4	Ketersediaan Pangan.....	23
Tabel II.5	Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2017.....	25
Tabel II.6	Produksi Perikanan.....	26
Tabel II.7	Program Pembangunan	26
Tabel II.8	Data Konsumsi Ikan Perkapita.....	27
Tabel II.9	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Nganjuk ..	27
Tabel III.1	Pemetaan permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sarana Pembangunan.....	31
Tabel III.2	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Nganjuk.....	37
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	40
Tabel IV.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
Tabel V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	47
Tabel VI.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk.....	50
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	59
Tabel VII.2	Indikator Kinerja Kunci.....	60
Tabel VII.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk	61
Tabel VII.4	Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018-2023 yang merupakan satu bagian utuh dari kinerja guna merealisasikan visi dan misi pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Selain itu, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 akan menjadi acuan dalam pengembangan Renstra SKPD 2018-2023. Selanjutnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang merupakan dokumen

perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang berkesinambungan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 terkait Penyusunan, Pengendalian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 5 (lima) tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan setiap tahun dengan menyesuaikan target dan tujuan

yang tercantum dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3.2 TUJUAN

1. Menjadi pedoman program bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh petugas teknis dinas, menjadi media akuntabilitas kinerja dinas, dan menjadi media pelaksanaan pembangunan yang aspiratif dan partisipatif;
2. Ditujukan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, yakni Tahun 2018-2023 sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Nganjuk;
3. Sebagai tolok ukur Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan evaluasi kinerja Dinas tahunan;
4. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;
5. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

1. TUGAS POKOK

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.

2. FUNGSI

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi:

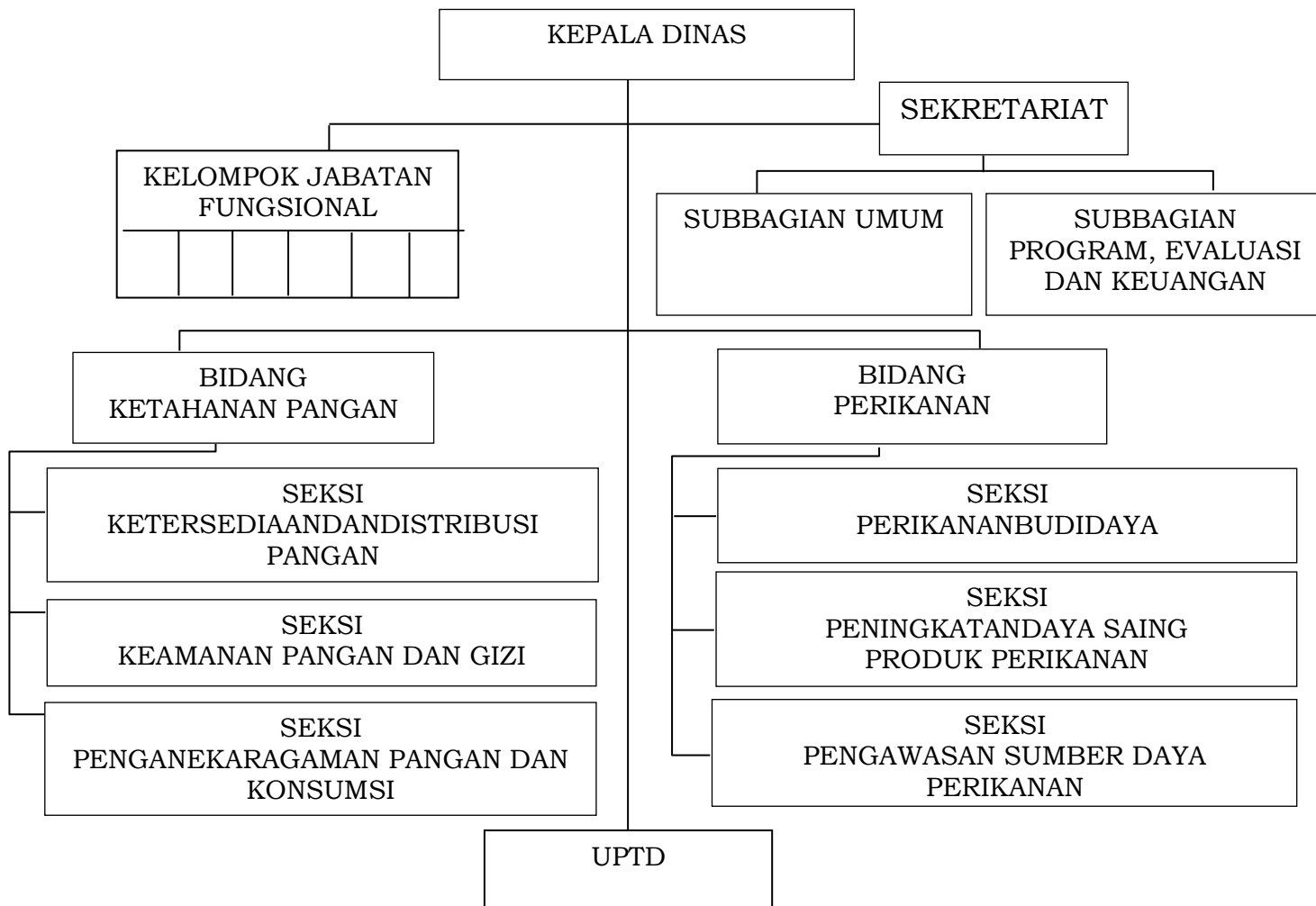
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. STRUKTUR ORGANISASI OPD

Adapun Struktur Organisasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK



I. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.

1. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja ketatausahaan di bidang umum, logistik, perencanaan dan keuangan;
- b. pengkoordinasian program penyelenggaraan kegiatan secara internal bidang-bidang pada urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c. membantu pelaksanaan perumusan kebijakan operasional urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektor;
- e. pengelolaan pelayanan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terkait dengan penyelenggaraan program dan kegiatan;
- g. pengelolaan manajerial di bagian umum, perencanaan dan keuangan;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan berkala kepada atasan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a) melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- b) melaksanakan administrasi kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c) menyelenggarakan urusan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan;

- d) melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- e) melaksanakan evaluasi dan monitoring yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan dan kepegawaian; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
- b) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- d) menyusun laporan keuangan;
- e) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- f) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- g) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
- h) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program; dan
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi serta penganeekaragaman pangan dan konsumsi.

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganeekaragaman pangan dan konsumsi;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganeekaragaman pangan dan konsumsi;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganeekaragaman pangan dan konsumsi;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganeekaragaman pangan dan konsumsi;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganeekaragaman pangan dan konsumsi;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganeekaragaman pangan dan konsumsi;
 - g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganeekaragaman pangan dan konsumsi;
 - h. penyiapan koordinasi pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - i. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - j. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas:
- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - c) membina dan melaksanakan tugas di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - d) melaksanakan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi;
 - e) memantau cadangan pangan, potensi produksi pangan, dan infrastruktur distribusi pangan;

- f) mengendalikan pangan dan stabilitas harga pangan strategis, pengalokasian dan pengembangan dana bidang ketersediaan dan distribusi pangan; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Keamanan Pangan dan Gizi

Seksi Keamanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang keamanan pangan dan gizi;
- b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keamanan pangan dan gizi;
- c) membina dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan pangan dan gizi;
- d) melaksanakan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi;
- e) memantau daerah rawan pangan, keamanan pangan serta mutu dan gizi pangan, penerapan standardisasi Batas Minimum Residu (BMR) dan labelisasi produk pangan olahan; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Penganekaragaman Pangan dan Konsumsi

Seksi Penganekaragaman Pangan dan Konsumsi mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang pangan dan konsumsi;
- b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pangan dan konsumsi;
- c) membina dan pelaksanaan tugas di bidang pangan dan konsumsi;
- d) mengembangkan dan memantau produk pangan olahan dan jaringan informasi pemasaran produk pangan olahan;
- e) melaksanakan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi;

- f) memantau keragaman pangan, mutu dan pola konsumsi pangan masyarakat serta penganekaragaman produk pangan berbasis sumber daya lokal dan tradisional; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan.

Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan tugas pembinaan di bidang perikanan meliputi perikanan budidaya, penguatan daya saing produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Perikanan Budidaya

Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas:

- a) melaksanakan peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan sarana perikanan budidaya;
- b) meningkatkan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya;
- c) meningkatkan produksi perikanan budidaya;
- d) meningkatkan penerapan teknologi perikanan budidaya dan pembenihan yang baik;
- e) meningkatkan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- f) melaksanakan pendampingan pembinaan kelompok pelaku utama perikanan budidaya;

- g) memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, pendampingan pembinaan kelompok pelaku utama perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
 - h) melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, pendampingan pembinaan kelompok pelaku utama perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya; dan
 - i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
- Seksi Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas:
- a) melaksanakan pembinaan mutu dan diversifikasi produk perikanan;
 - b) melaksanakan penguatan promosi produk perikanan;
 - c) meningkatkan keberlanjutan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
 - d) meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan;
 - e) melaksanakan pendampingan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan;
 - f) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosiproduk perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan, peningkatan konsumsi makan ikan dan pendampingan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan;

- g) melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan, peningkatan konsumsi makan ikan dan pendampingan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas:

- a) melaksanakan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum;
- b) melaksanakan pengawasan usaha budidaya;
- c) melaksanakan pengawasan usaha pengolahan produk perikanan;
- d) melaksanakan pengawasan penguatan daya saing produk perikanan;
- e) melakukan pendampingan pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan;
- f) melaksanakan pengawasan pengelolaan perairan umum serta penanganan tindak pidana Bidang Perikanan;
- g) memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum, pengawasan usaha budidaya, pengawasan usaha pengolahan produk perikanan, pengawasan penguatan daya saing produk perikanan, pendampingan pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan dan pengawasan pengelolaan perairan umum serta penanganan tindak pidana bidang perikanan;
- h) melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum, pengawasan usaha budidaya, pengawasan usaha pengolahan produk perikanan, pengawasan penguatan daya saing produk perikanan, pendampingan pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan dan pengawasan pengelolaan perairan umum, serta penanganan tindak pidana dan perikanan; dan

- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pada Bulan Januari Tahun 2018 pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk sebanyak 24 orang Pegawai Negeri Sipil. Pada Tahun 2018 terdapat Tenaga Harian Lepas (THL)/ Pegawai Non PNS Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.

Sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk adalah 46 (empat puluh enam) orang, terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang PNS, 22 (dua puluh dua) orang THL/ Pegawai Non PNS.

Data pegawai menurut Pangkat dan Golongan adalah :

Tabel II.1
Data Jumlah Pegawai
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah PNS / CPNS
1.	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1 Orang
2.	Pembina Tingkat I	(IV/b)	1 Orang
3.	Pembina	(IV/a)	2 Orang
4.	Penata Tingkat I	(III/d)	6 Orang
5.	Penata	(III/c)	2 Orang
6.	Penata Muda Tingkat I	(III/b)	3 Orang
7.	Penata Muda	(III/a)	- Orang
8.	Pengatur Tingkat I	(II/d)	1 Orang
9.	Pengatur	(II/c)	7 Orang
10.	Pengatur Muda Tingkat I	(II/b)	- Orang
11.	Pengatur Muda	(II/a)	1 Orang
12.	Juru Tingkat I	(I/d)	- Orang
13.	Juru	(I/c)	- Orang
14.	Juru Muda Tingkat	(I/b)	- Orang
15.	Juru Muda	(I/a)	- Orang
JUMLAH			24 Orang

Data pegawai menurut Tingkat Pendidikan adalah :

Gambar II.2
Data Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS / CPNS
1.	Magister (S-2)	2 Orang
2.	Sarjana (S-1)	17 Orang
3.	Diploma IV (D-IV)	- Orang
4.	Diploma III (D-III)	4 Orang
5.	Diploma II (D-II)	- Orang
6.	Diploma I (D-I)	- Orang
7.	SMA (Sederajat)	16 Orang
8.	SMP	- Orang
9.	SD	2 Orang
	JUMLAH	24 Orang

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah tenaga Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk yang berstatus ASN pada tahun 2018 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang. Dilihat dari segi kuantitas pegawai masih dikatakan kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang ditangani, sehingga perlu adanya tambahan tenaga dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui diklat teknis fungsional dan diklat lain yang mendukung pengembangan organisasi.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk menempati gedung dengan Luas bangunan yang 525 (lima ratus dua puluh lima) m² dan 1 (satu) gedung untuk pertemuan seluas 50 (lima puluh) m², gedung tersebut masih kurang memadai karena Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk juga terdapat penyuluh perikanan (PPL) yang membutuhkan tempat untuk sarana dan prasarana. Kondisi ini belum cukup ideal sejalan dengan tuntutan tugas-tugas yang setiap saat membutuhkan pelayanan dan koordinasi, namun demikian masih diperlukan adanya tambahan prasarana seperti komputer dan printer serta laptop yang saat ini belum mencukupi dengan beban tugas yang ada.

Sedangkan untuk mobilitas di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk, mobil dinas roda 4 (empat) yang ada sebanyak 5 (lima) unit dengan kondisi 4 (empat) unit dalam keadaan baik dan 1 (satu) unit dalam keadaan kurang layak sehingga perlu adanya penggantian mobil yang baru, prasarana kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor yang ada sebanyak 16 (enam belas) unit, yang semuanya dalam keadaan baik. Pembangunan Daerah tidak dapat terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana Daerah yang bersifat fisik. Tercukupinya penyediaan sarana dan prasarana pendukung akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi.

Secara keseluruhan, daftar aset Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel II.3
Daftar Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2017

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Tanah	5	Unit
2	Alat-alat angkutan	22	Unit
3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	5	Unit
4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5	Unit
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	593	Unit
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	9	Unit
7	Alat-alat Laboratorium	196	Unit
8	Bangunan Gedung	39	Unit
9	Jalan dan Jembatan	7	Unit
10	Bangunan Air/Irigasi	11	Unit
11	Instalasi	2	Unit
12	Jaringan	2	Unit
13	Hewan Ternak dan Tumbuhan	1	Unit
14	Kendaraan Dinas Roda 4	5	Unit
15	Kendaraan Dinas Roda 2	16	Unit
16	Kendaraan Dinas Roda 3	1	Unit
17	Mesin Absensi	1	Unit
18	AC	5	Unit
19	Kulkas	4	Unit
20	Mini Komputer	4	Unit
21	PC Unit	5	Unit
22	Laptop	7	Unit
23	Note Book	5	Unit
24	Printer	10	Unit
25	Timbangan BBI	4	

Tabel II.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan akses pangan bagi masyarakat			Persentase ketersediaan pangan utama (%)	3,37	3,51	3,66	3,69	3,70	3,8	3,97	3,73	3,18		1,12	1,13	1,01	0,86	
2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan non budidaya serta penyediaan sarana prasarana produksi perikanan dan pangsa pasar hasil produksi perikanan			Meningkatnya jumlah produksi :															
				Perikanan Budidaya (ton)	10.945	11.821	12.531	13.158	13.812	12.903,20	10.535	9.346	11.785	1,17	0,89	0,74	0,89		
				Perikanan Non Budidaya (ton)	678,31	712,20	747,80	785,10	824,30	666,99	676,99	580,6	671	0,98	0,95	0,77	0,85		

Tabel II.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	343.457.000	433.362.000	461.940.000	357.362.000	355.499.900												
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.448.502.500	632.517.500	650.077.500	283.966.000	599.500.030												
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.625.000	6.000.000	6.000.000	-	-												
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	4.500.000	14.000.000	14.000.000	15.000.000	15.000.000												
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	3.465.330.000	1.361.930.000	811.750.000	826.734.000	819.000.000	3.322.156.057	1.259.125.000	668.023.025	783.914.470,13		95,86 %	92,45 %	82,29 %	94,82 %			
6	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2.798.801.000	257.850.000	371.695.550	768.000.000	245.000.000	2.761.755.500	240.587.481	359.952.200	618.054.817		98,67 %	93,30 %	96,84 %	80,47 %			
7	Program Pengembangan Sistim Penyuluhan Perikanan	146.850.000	79.150.000	98.000.000	985.000.000	205.000.000	118.351.000	78.918.000	97.025.000	178.033.000		80,59 %	99,70 %	99,00 %	18,07 %			

2.3 KINERJA PELAYANAN

Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai motor penggerak sektor pertanian dan perikanan, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor pertanian dan perikanan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi pertanian dan perikanan Kabupaten Nganjuk. Untuk itu peran Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam perekonomian adalah dengan meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Ketersediaan dan Distribusi pangan masyarakat serta Produksi Perikanan.

Lapangan kerja yang luas serta pengembangan pengolahan hasil pertanian dan meningkatnya produksi perikanan dalam rangka pemanfaatan seoptimal mungkin potensi sektor pertanian dan perikanan haruslah menjadi Prioritas sebagai kontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi.

A. BIDANG KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan serta mampu mengatasi kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan Pangan merupakan suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga subsistem yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup ditingkat rumah tangga, distribusi pangan yang lancar dan konsumsi pangan yang bermutu dan aman.

1. Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1.) Produksi dalam negeri; (2.) pemasokan pangan; dan (3.) pengelolaan cadangan pangan.

Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pokok. Cadangan pangan pemerintah khususnya beras dikelola oleh

Perum Bulog. Untuk cadangan pangan pemerintah daerah diatur Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, termasuk cadangan pangan pemerintah desa diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Untuk cadangan pangan masyarakat meliputi rumah tangga, pedagang dan industri pengolahan. Penyelenggaraan penguatan cadangan pangan daerah dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan mandiri.

Tabel II.4
Ketersediaan Pangan

No	Uraian Indikator Sasaran	Satuan	2013	Realisasi Kinerja			
				2014	2015	2016	2017
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah	%	310	380	397	373	350

2. Pelayanan Dasar Distribusi dan Akses pangan

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, sangat sulit diwujudkan, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan.

Mengatasi masalah tersebut diatas, maka kegiatan distribusi pangan difokuskan pada kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-LDPM) bagi gabungan kelompok tani (Gapoktan) Kebijakan yang mendasari kegiatan Penguatan-LDPM

adalah penguatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya untuk petani di sentra produksi pangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk (a) mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik, (b) meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah dari hasil produksi untuk perbaikan pendapatan, (c) memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan Gapoktan agar dapat meningkatkan akses pangan bagi anggotanya pada saat paceklik.

3. Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Pola konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan, disamping juga efisiensi untuk mencegah pemborosan. Pola konsumsi pangan juga mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh (food utility) dapat optimal, dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin dan mineral serta aman. Pola konsumsi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Sebagai acuan kualitatif untuk konsumsi pangan adalah

Angka Kecukupan Gizi (AKG), rata-rata per kapita perhari untuk energi 2.400 (dua ribu empat ratus) kilo kalori/kapita/hari dan protein 63 (enam puluh tiga) gram/kapita/hari, sedangkan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 (seratus) sebagai pola ideal.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Tabel II.5
Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan Neraca Bahan Makanan
(NBM) Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 – 2017

No.	Kontribusi	Energi (kkal/kap/hari)			Protein (gram/kap/hari)		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	Hewani	771,16	771,16	584,81	66,82	66,82	49,13
2.	Nabati	5.203	5.203	4.759	163,90	163,90	134,03
3.	Total	5.974	5.974	5.344	230,72	230,72	183,16

4. Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan

Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi maupun **stunting**. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis) dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun sosial (transien). Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena; (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu kiranya dicari konsep-konsep penangannya yang efektif dan efisien sesuai situasi dan kondisi yang ada. Salah satu konsep tersebut adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data, informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.

B. BIDANG PERIKANAN

Bidang Perikanan menjadi salah satu sektor yang menjadi tupoksi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk. Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan.

Berikut rekapitulasi data di Bidang Perikanan tahun 2012-2017 seperti pada tabel berikut:

Tabel II.6
Produksi Perikanan

No	Uraian Indikator Sasaran	satuan	2013	Realisasi Kinerja			
				2014	2015	2016	2017
1	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	11.200	12.903,20	10.535	9346	11.785
2	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Non Budidaya	Ton	666,99	676,99	580,6	534,19	671

Tabel II.7
Program Pembangunan

No	Uraian	Realisasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3.926.274.750	2.761.775.500	240.587.481	359.952.200	220.926.297
2	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	25.850.000	118.351.000	78.918.000	97.025.000	36.747.000
3	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	102.328.000	135.161.000	162.260.500	149.916.500	97.260.600
	JUMLAH	4.054.452.750	3.015.287.500	481.765.981	606.893.700	354.933.897

Tabel II.8
Data Konsumsi Ikan Per Kapita

No	Tahun	Konsumsi Ikan (Kg/ Kapita/Tahun)
1.	2013	18,40
2.	2014	19,90
3.	2015	23,51
4.	2016	22,16
5.	2017	22,42

Tabel II.9
Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Nganjuk

No.	Kecamatan	Jumlah	
		2016	2017
1	Nganjuk	18	20
2	Wilangan	8	10
3	Bagor	18	22
4	Sukomoro	10	14
5	Rejoso	9	12
6	Pace	27	29
7	Jatikalen	5	9
8	Patianrowo	10	15
9	Ngluyu	3	4
10	Kertosono	8	17
11	Loceret	29	30
12	Berbek	22	23
13	Ngetos	6	7
14	Sawahan	10	16
15	Gondang	9	10
16	Ngronggot	19	28
17	Prambon	17	24
18	Lengkong	7	10
19	Tanjunganom	41	59
20	Baron	15	17
	Jumlah	291	376

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4.1. Tantangan

1. Dewan Ketahanan Pangan Kurang Optimal
2. Beralih fungsi lahan pertanian produktif menjadi fungsi yang lain
3. Konsumsi masyarakat terhadap gizi seimbang masih kurang
4. Tingginya fluktuasi harga pangan
5. Masih banyaknya pangan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan yang tidak untuk konsumsi
6. Tidak adanya penyuluh Bidang Ketahanan Pangan
7. Produksi Ikan konsumsi menurun
8. Harga pakan ikan masih tinggi
9. Ketersediaan bibit unggul masih kurang
10. Teknologi budidaya perikanan masih rendah
11. Tingkat konsumsi ikan masih rendah
12. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)/ Petugas Teknis di Bidang Perikanan

2.4.2. Peluang

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang memberikan keleluasaan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik
- b. Adanya keterbukaan kerjasama dengan pihak lain baik Pemerintah Pusat, Propinsi, Kota/ Kabupaten lain, swasta, lembaga donor, LSM dan lembaga-lembaga lain untuk memberikan dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program
- c. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang mendukung pengembangan Pertanian dan Perikanan
- d. Dimilikinya potensi penduduk, pelaku usaha, SDA untuk dikembangkan
- e. Kemudahan dalam menyampaikan informasi melalui berbagai media.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi saat ini. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nganjuk. Penyajian analisis isu-isu strategis diharapkan dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Nganjuk dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis RPJMD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Beralih fungsi lahan pertanian produktif menjadi fungsi yang lain
2. Konsumsi masyarakat terhadap gizi seimbang masih kurang
3. Tingginya fluktuasi harga pangan
4. Masih banyaknya pangan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan yang tidak untuk konsumsi
5. Tidak adanya penyuluh Bidang Ketahanan Pangan
6. Produksi Ikan konsumsi menurun
7. Harga pakan ikan masih tinggi
8. Ketersediaan bibit unggul masih kurang

9. Teknologi budidaya perikanan masih rendah
10. Tingkat konsumsi ikan masih rendah
11. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)/ Petugas Teknis di bidang perikanan
12. Terbatasnya Sarana dan Prasarana hasil Perikanan

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sarana Pembangunan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)/ Petugas Teknis dibidang Ketahanan Pangan dan Perikanan, Terbatasnya Sarana dan Prasarana, serta masih banyaknya pangan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan yang tidak layak konsumsi.	Beralih fungsi lahan pertanian produktif menjadi fungsi yang lain	Lahan produksi semakin berkurang
		Konsumsi masyarakat terhadap gizi seimbang masih kurang	Rendahnya konsumsi gizi seimbang
		Tingginya fluktuasi harga pangan	Harga pangan yang tidak menentu
		Masih banyaknya pangan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan yang tidak layak konsumsi	Tingginya bahan pangan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan
		Tidak adanya penyuluh Bidang Ketahanan Pangan	Kurangnya penyuluh Bidang Ketahanan Pangan
		Produksi Ikan konsumsi menurun	Kurangnya produksi ikan konsumsi
		Harga pakan ikan masih tinggi	Tingginya harga pakan
		Ketersediaan bibit unggul masih kurang	Kurangnya ketersediaan bibit unggul
		Teknologi budidaya perikanan masih rendah	Rendahnya teknologi budidaya
		Tingkat konsumsi ikan masih rendah	Rendahnya konsumsi ikan

		Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)/ Petugas Teknis di bidang perikanan	Kurangnya Petugas Teknis Bidang Perikanan
		Terbatasnya Sarana dan Prasarana hasil Perikanan	Kurangnya sarana dan prasarana hasil perikanan

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke arah mana dan bagaimana Kabupaten Nganjuk eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan. Visi Kabupaten Nganjuk adalah “Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)”.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai visi adalah:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban;
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (*accountable*) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta produktif lain berbasis teknologi tepat guna;

5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata;
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2014-2018 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan mendukung terlaksananya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terutama pada Misi ke empat. *Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta Sektor Produktif lain berbasis Teknologi Tepat Guna.*

Dengan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Strategi sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal	Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian dan Perikanan, serta Kesejahteraan Petani	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	Meningkatkan Kemampuan Pemenuhan Konsumsi dan Keamanan Pangan.
	Meningkatnya Volume Usaha Sektor Industri dan Perdagangan		Mengembangkan Sektor Usaha Mikro, Koperasi serta Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan

3.3 PROGRAM UNGGULAN NGANJUK NYAWIJI 2018-2023

Program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih mengacu kepada tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang akan mendukung terlaksananya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

1. Revitalisasi Bidang Pertanian dan Peternakan

Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain :

a. Mengembangkan Produk Pangan Alternatif, dengan Kegiatan :

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

b. Pertanian Terpadu, dengan Kegiatan :

Pengembangan Budidaya Ikan melalui Nganjuk Farming Development Center

c. Gudang Penyangga, dengan Kegiatan :

Pembangunan Lumbung Pangan Desa Skala Poktan

3.4 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD Kabupaten terhadap terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk melakukan program dan kegiatan telah sesuai dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.5.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Peraturan daerah kabupaten nganjuk nomor 02 tahun 2011 Tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten nganjuk tahun 2010-2030 Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pengendalian kawasan Agropolitan, perwujudan kawasan permukiman perdesaan, kawasan pertanian meliputi :

- a. Penetapan, Pemetaan dan Identifikasi lahan sawah yang beririgasi teknis untuk mendukung program Ketahanan Pangan Nasional;
- b. Pengaturan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha Pertanian;
- c. Pengkajian Potensi Komoditas Agrobisnis yang memiliki nilai ekonomi tinggi, penetapan kawasan agrobisnis dan pengembangan pengelolaan sistem pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
- d. Menyediakan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong Kawasan Permukiman Perdesaan.

3.5.2 TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Isu Pembangunan berkelanjutan berdasarkan PP No 46 Tahun 2016 dalam Penyusunan KLHS harus memuat isu Pembangunan berkelanjutan antara lain :

- a. Penurunan atau terlampauinya kapasitas daya dukung dan daya saing lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Peningkatan Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup;
- c. Penurunan Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- d. Penurunan mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
- e. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan atau kebakaran hutan dan lahan;
- f. Penurunan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
- g. Peningkatan Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- h. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau penurunan penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;

- i. Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat;
- j. Peningkatan ancaman terhadap perlindungan kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Isu strategis pembangunan berkelanjutan Kabupaten Nganjuk berdasarkan partisipasi masyarakat :

Tabel III.2
Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Nganjuk

No	Issue Pembangunan berkelanjutan (PB)	Isu Pembangunan Berkelanjutan
1	Tata Ruang	Semakin meningkatnya aktivitas alih fungsi lahan
2	Lingkungan	Semakin meningkatnya volume timbulan sampah
3	Pertanian dan Pangan	Berkurangnya kapasitas pangan lokal terhadap produksi pertanian dan ketahanan pangan
4	Bencana	Tingginya tingkat kerawanan bencana alam tanah longsor, angin dan banjir
5	Pertambangan	Penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan
6	Industri	Rendahnya daya saing sumber daya manusia lokal yang memicu konflik social migrant
7	Transportasi	Dampak negative pengembangan akses baru ke dalam wilayah kabupaten nganjuk
8	Sumber daya air	Semakin menurunnya kualitas sumber daya air karena rendahnya upaya konservasi
9	Kesehatan	Belum optimalnya kapasitas layanan kesehatan
10	Desa dan informasi	Belum efektifnya komunikasi atar level pemerintah
11	Perikanan	Penurunan produksi sector perikanan dan tingkat konsumsinya
12	Pariwisata	Tren kunjungan wisata menurun

Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis pada :

1. Program Bidang Ketahanan Pangan
Berkurangnya Kapasitas Lokal terhadap Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Program Bidang Perikanan
Penurunan Produksi Sektor Perikanan dan Tingkat Konsumsi Ikan

3.6 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Selama lima tahun ke depan terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat Daerah yaitu “Belum Optimalnya Ketersediaan dan Keamanan Pangan dalam menunjang Ketahanan Pangan Daerah dan belum Optimalnya Produksi Perikanan Budidaya dan Perairan Umum”, antara lain:

1. Beralih fungsi lahan pertanian produktif menjadi fungsi yang lain
2. Rendahnya Konsumsi masyarakat terhadap gizi seimbang
3. Tingginya fluktuasi harga pangan
4. Masih banyaknya pangan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan yang tidak layak konsumsi
5. Tidak adanya penyuluh Bidang Ketahanan Pangan
6. Produksi Ikan mengalami penurunan
7. Masih tingginya harga pakan ikan sehingga menyebabkan keuntungan petani ikan berkurang
8. Masih Kurangnya Ketersediaan bibit unggul dibidang Perikanan
9. Masih rendahnya Teknologi budidaya perikanan
10. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan pada masyarakat
11. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)/ Petugas Teknis dibidang perikanan
12. Gerakan Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan untuk lebih dioptimalkan pelaksanaannya pada setiap Kecamatan.
13. Penebaran Ikan pada Waduk/Perairan Umum (Restocking) perlu lebih ditingkatkan dalam rangka menunjang peningkatan konsumsi ikan pada masyarakat
14. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) perlu lebih ditingkatkan agar terwujud Diversifikasi Pangan dan mengurangi ketergantungan pada beras.
15. Perlu adanya Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan yang kosong melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
16. Masih Kurangnya Ketersediaan Lumbung Pangan Skala Poktan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten Nganjuk secara umum, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk pada khususnya dalam keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Nganjuk tahun 2018–2023 adalah: Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Ketersediaan dan Distribusi Pangan masyarakat serta Produksi Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Sasaran : Terwujudnya Pemenuhan Pangan Masyarakat yang beragam, aman dan bergizi. Melalui indikator :
 1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama
 2. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
2. Sasaran : Terwujudnya Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya serta Pemenuhan Konsumsi Ikan melalui Indikator :
 1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan non Budidaya (Ton)
 2. Jumlah Ikan dikonsumsi oleh masyarakat (Kg)

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018- 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel IV.1**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan bagi Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Terwujudnya Pemenuhan Pangan Masyarakat yang beragam, aman dan bergizi	1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama 2. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	Terwujudnya Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya serta Pemenuhan Konsumsi Ikan	1. Jumlah produksi Perikanan budidaya dan non budidaya (Ton) 2. Jumlah Ikan dikonsumsi oleh masyarakat (Kg)

Tabel IV.2
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A	SASARAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL	TARGET				
							2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan bagi masyarakat	Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Rumus : PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	88,9 %	96,8 %	Terwujudnya Pemenuhan Pangan Masyarakat yang beragam, aman dan bergizi	<p>1.Persentase Ketersediaan Pangan Utama Rumus : Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (Kg) _____ x 100% Jumlah Penduduk</p> <p>2.Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Rumus : a. Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari) : Ketersediaan pangan/kapita/hari x kandungan kalori x BDD _____ 100</p>	317,4	317,8	318,3	318,8	319,3	319,7
							4.490	4.010	3.530	3.049	2.569	2.089

					<p>b. Ketersediaan protein (gram/protein/hari) :</p> $\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari} \times \text{kandungan protein}}{\text{x BDD}}$ <p style="text-align: center;">100</p> <p><i>KET : “ Ketersediaan Energi dan Protein merupakan gambaran dari pencapaian kinerja Ketahanan Pangan Daerah. Ketersediaan Energi dan Protein selain berkaitan dengan aspek produksi juga mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat. Standar kecukupan protein berdasarkan kaidah gizi sehat adalah sebesar 63 gram perkapita/hari sedangkan standar kecukupan energi berdasarkan kaidah gizi sehat adalah sebesar 2.400 kkal perkapita/hari. Dengan demikian perencanaan target kinerja 5 tahun kedepan mempedomani standar tersebut. ”</i></p>	195,1	172,7	150,3	128,0	105,6	83,2
--	--	--	--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	------

2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	3,90 (Tahun 2017)	4,20	Terwujudnya Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya serta Pemenuhan Konsumsi Ikan	<p>1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya (Ton) Rumus : $\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan Budidaya(ton)}}{\text{Target Daerah (ton)}} \times 100\%$ </p> <p>11.785 11.820 11.835 11.844 11.858 11.871</p> <p>2. Jumlah Ikan dikonsumsi oleh masyarakat (Kg) Rumus : $\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Target Daerah (ton)}} \times 100\%$ </p> <p>22,45 25,05 26,00 26,35 27,12 28,75</p>	$\frac{11.785}{11.820} \times 100\%$	$\frac{11.835}{11.844} \times 100\%$	$\frac{11.858}{11.871} \times 100\%$	$\frac{11.820}{11.835} \times 100\%$	$\frac{11.844}{11.858} \times 100\%$	$\frac{11.871}{11.885} \times 100\%$
						$\frac{656}{674} \times 100\%$	$\frac{655}{666} \times 100\%$	$\frac{678}{668} \times 100\%$	$\frac{674}{655} \times 100\%$	$\frac{666}{678} \times 100\%$	$\frac{668}{655} \times 100\%$	
						$\frac{22,45}{25,05} \times 100\%$	$\frac{26,00}{26,35} \times 100\%$	$\frac{27,12}{28,75} \times 100\%$	$\frac{25,05}{26,00} \times 100\%$	$\frac{26,35}{27,12} \times 100\%$	$\frac{28,75}{27,12} \times 100\%$	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategy objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pembangunan daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja; strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

5.1 Strategi

- a. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi dalam meningkatkan Budidaya Perikanan secara berkelanjutan serta meningkatkan upaya Ketersediaan dan Keamanan Pangan.
- b. Peningkatan ketrampilan, teknologi proses dan jaringan distribuserta menyediakan fasilitas, konsultasi dan informasi bagi usaha Perikanan.

- c. Mengembangkan sentra-sentra Perikanan Budidaya dan Non Budidaya.
- d. Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan SDM yang ada, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi melalui kesempatan pendidikan dan pelatihan.
- e. Mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru.
- f. Mengoptimalkan pemantapan kelembagaan pangan, sehingga Bidang Ketahanan Pangan dapat berjalan secara optimal.
- g. Mengisi Tenaga yang berkompeten dibidang Pangan, Gizi dan Perikanan.
- h. Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Perikanan dan Pangan ditingkat pedesaan, antara lain melalui pinjaman modal.
- i. Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pangan dan Perikanan ditingkat rumah tangga, baik melalui penyuluhan maupun pelatihan, serta melalui pengembangan program Desa Mandiri Pangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan.
- j. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penganekaragaman pangan, Gemarikan melalui pelatihan kepada ibu-ibu PKK dan kelompok Wanita Tani maupun UKM, serta Lomba Cipta Menu Penganekaragaman Pangan.
- k. Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Keuangan yang tepat waktu dan akuntabel.
- l. Mengikutsertakan Aparatur yang berkompeten dalam berbagai diklat dan penekanan penerapan Good Governance.
- m. Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Perikanan dan Ketahanan Pangan
- n. Meningkatkan kemampuan pemenuhan konsumsi dan keamanan pangan
- o. Mengembangkan sektor usaha mikro, industri, pengolah hasil perikanan

5.2 Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk 2018-2023 :

- a. Meningkatkan kondisi kecukupan ketersediaan pangan, ikan sehingga mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatnya konsumsi ikan.
- b. Meningkatkan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan serta Ikan bagi masyarakat.
- c. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan bagi setiap Rumah Tangga dalam jumlah mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan berimbang.
- d. Meningkatkan Pengawasan terhadap Keamanan Pangan segar serta meningkatkan mutu dan Kualitas Pangan.
- e. Mengoptimalkan Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan, Pemasar, Kelompok Afinitas dan Kelompok Tani.
- f. Peningkatan Fungsi dan Produksi Balai Benih Ikan yang ada dalam upaya memenuhi ketersediaan benih ikan air tawar, dan perairan umum melalui penebaran benih (Restocking) serta untuk memenuhi kebutuhan benih bagi kelompok pembudidaya ikan.
- g. Meningkatkan Disiplin Aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat
- h. Pengembangan Budidaya Perikanan melalui Nganjuk Farming Development Center
- i. Peningkatan ketersediaan dan penganekaragaman konsumsi pangan Daerah.

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)			
MISI : Meningkatkan Keberpihakan Pemerintah dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal serta Sektor Produktif Lain Berbasis Teknologi Tepat Guna			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan bagi masyarakat	Terwujudnya Pemenuhan Pangan Masyarakat yang beragam, aman dan bergizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pemantapan kelembagaan pangan, sehingga bidang Ketahanan Pangan dapat berjalan secara optimal 2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Panganekaragaman Pangan, Gemarikan melalui pelatihan kepada ibu-ibu PKK dan kelompok wanita Tani maupun UKM, serta Lomba cipta Menu Panganekaragaman Pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit modal usaha dengan bunga ringan & tanpa agunan 2. Inovasi pengolahan produk pertanian sehingga memiliki branding yang dikenal & disukai masyarakat 3. Mengembangkan produk pangan alternatif 4. Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif 5. Meningkatkan kreatifitas pemuda untuk menemukan & mengembangkan produk-produk unggulan baru

<p>Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya</p>	<p>Terwujudnya Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya serta Pemenuhan Konsumsi Ikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sentra-sentra Perikanan Budidaya dan Non Budidaya 2. Peningkatan Ketrampilan, Teknologi proses dan jaringan distribusi serta menyediakan fasilitas, konsultasi dan informasi bagi usaha perikanan 3. Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Perikanan dan Pangan ditingkat pedesaan, antara lain melalui pinjaman modal 4. Pengembangan Perikanan melalui Nganjuk Farming Development Center 	
--	---	--	--

BAB VI

PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk, Rencana program dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 terdiri dari program-program yang menunjang tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk pada tabel 6.1 berikut :

Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Th-1 2019		Th-2 2020		Th-3 2021		Th-4 2022		Th-5 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
	Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Ketersediaan dan Distribusi Pangan Masyarakat serta Produksi Perikanan			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%	388.900.000	80%	729.140.000	80%	767.140.000	80%	757.900.000	80%	773.900.000	80%	3.416.980.000	DKPP	
				1. Penyediaan jasa surat menyurat			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		7.500.000			
				2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		110.000.000		510.000.000			
				3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			62.400.000		36.240.000		36.240.000		36.000.000		36.000.000		206.880.000			
				4. Penyediaan alat tulis kantor			25.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		120.000.000			
				5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			20.000.000		10.000.000		22.000.000		23.000.000		23.000.000		98.000.000			
				6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			7.000.000		5.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		36.000.000			

				7.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				8.000.000		9.000.000		9.000.000		10.000.000		10.000.000		46.000.000		
				8.Penyediaan makanan dan minuman				25.000.000		25.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		128.000.000		
				9.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				120.000.000		125.000.000		130.000.000		130.000.000		135.000.000		640.000.000		
				10.Monitoring, evaluasi dan pelaporan				15.000.000		15.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		105.000.000		
				11.Pengadaan peralatan dan bahan pembersih				5.000.000		5.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		34.000.000		
				12. Belanja Jasa Administrasi Keuangan				-		199.320.000		199.320.000		198.000.000		198.000.000		794.640.000x		
				13.Pengelolaan dan Pendokumentasian Arsip Perangkat Daerah				-		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		60.000.000		
				2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	100%	100%	485.500.000	100%	423.080.000	100%	828.080.000	100%	493.080.000	100%	493.080.000	100%	2.722.820.000		
				1.Pengadaan perlengkapan gedung kantor				15.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000		75.000.000		215.000.000		
				2.Pengadaan peralatan gedung kantor				10.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		130.000.000		
				3.Pengadaan mebeleur				-		-		-		-		-		-		
				4.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				315.500.000		188.080.000		193.080.000		193.080.000		193.080.000		1.082.820.000		

				5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				120.000.000		130.000.000		130.000.000		140.000.000		140.000.000		660.000.000		
				6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				10.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		110.000.000		
				7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				10.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		100.000.000		
				8. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		25.000.000		
				9. Pengadaan tempat parkir				-		-		-		-		-		-		
				10. Pengadaan Mobil Dinas/Operasional				-		-		400.000.000		-		-		400.000.000		
				3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	-	100%	24.200.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	39.200.000		
				1. Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani				-		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		20.000.000		
				2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				-		7.200.000		-		-		-		7.200.000		
				3. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya				-		12.000.000		-		-		-		12.000.000		
				4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	100%	100%	-	100%	-		30.000.000		-		-		30.000.000		
				1. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur				-		-		15.000.000		-		-		15.000.000		

				2.Sosialisasi peraturan perundang-undangan			-		-		15.000.000		-		-		15.000.000			
				5.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	95.000.000		
				1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		50.000.000		
				2.Penyusunan laporan keuangan semesteran				2.500.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		22.500.000		
				3.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				2.500.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		22.500.000		
Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan bagi Masyarakat	Terwujudnya Pemenuhan Pangan Masyarakat yang Beragam, Aman, dan Bergizi	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		6.Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian)	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	317,4	317,8	390.000.000	318,3	2.515.000.000	318,8	2.340.000.000	319,3	2.295.000.000	319,7	2.540.000.000	319,7	10.080.000.000		
				1.Pengembangan Cadangan Pangan	Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan dan Pengumpulan Data Cadangan Pangan di kelompok/ Lembaga Pengelola Cadangan Pangan Masyarakat			20.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000		75.000.000		220.000.000		

				2. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan/ Kelompok Distribusi Pangan Masyarakat (Dagulir)	Terlaksananya pembinaan kepada Lembaga/ Kelompok penerima dana bergulir di Kabupaten Nganjuk			25.000.000		20.000.000		35.000.000		40.000.000		50.000.000		170.000.000		
				3. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan (Revitalisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten)	Terlaksananya Rapat Koordinasi/ Konsultasi DKP			50.000.000		50.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		475.000.000		
				4. Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan Monitoring Evaluasi (Penguatan Daerah Rawan Pangan / Penanganan Kemiskinan)	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Demapan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat			50.000.000		50.000.000		150.000.000		200.000.000		300.000.000		750.000.000		
				5. Pengembangan Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)	Terlaksananya Pembinaan Gapoktan penerima bantuan			-		215.000.000		215.000.000		200.000.000		250.000.000		880.000.000		
				6. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI)	Terlaksananya Pendampingan kepada Kelompok Pelaksana TTI			15.000.000		410.000.000		410.000.000		250.000.000		300.000.000		1.385.000.000		
				7. Panel Harga Pangan	Terlaksananya monitoring dan tersusunnya panel harga pangan			15.000.000		25.000.000		30.000.000		25.000.000		30.000.000		125.000.000		
				8. Pendampingan Serap Gabah (Sergab)	Terserapnya Gabah Kering Panen Luar Kualitas Petani/ Poktan disesuaikan standart yang berlaku			15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		125.000.000		

				9.Pembangunan Lumbung Pangan Desa Skala Poktan	Terlaksananya pembangunan fisik lumbung pangan			-		950.000.000		950.000.000		750.000.000		750.000.000		3.400.000.000		
				10.Pembangunan Lantai Jemur Skala Rumah Tangga	Terlaksananya pembangunan fisik lantai jemur skala rumah tangga			-		400.000.000		400.000.000		600.000.000		600.000.000		2.000.000.000		
				11.Festival Makanan Khas Daerah Tingkat Baperwil Bojonegoro	Terlaksananya Lomba/Festival Makanan Khas Daerah Tingkat Baperwil Bojonegoro			200.000.000		-		-		-		-		200.000.000		
				12. Pengembangan Akses Pangan				-		300.000.000		-		-		-		300.000.000		
					Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita			460.000.000		1.085.000.000		925.000.000		1.000.000.000		1.030.000.000		4.500.000.000		
					Ketersediaan Energi	4,49	4,01			3,53		3,04		2,56		2,08		2,08		
					Protein	195,1	172,7			150,3		128,0		105,6		83,2		83,2		
				1.Pengembangan Pangan Lokal				-		-		-		-		-		-		
				2.Pendampingan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Karangkitri				50.000.000		400.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		1.200.000.000		
				3.Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)				300.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.300.000.000		
				4.Analisis Neraca Bahan Makan dan Pola Pangan Harapan (NBM-PPH)				20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		130.000.000		

			5. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan				60.000.000		80.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000		510.000.000			
			6. Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi				30.000.000		30.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		310.000.000			
			7. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Terlaksananya Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan			-		-		-		-		-		-			
			8. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan				-		-		-		-		-		-			
			9. Pengembangan Sumber Daya Pangan				-		-		-		-		-		-			
			10. Pengembangan OPAL (Obor Pangan Lestari)				-		50.000.000		-		-		-		50.000.000			
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya (Ton)		7. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi perikanan Budidaya dan Non Budidaya (Ton)			643.490.000		1.860.000.000		1.425.000.000		1.805.000.000		1.805.000.000		7.313.490.000 7.538.490.000			
		Budidaya (Ton)			11.785	11.820		11.835		11.844		11.858		11.871		11.871				
		Non Budidaya (Ton)			656	674		655		666		678		668		668				
			1. Updating Data Statistik Perikanan				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		225.000.000			
			2. Optimalisasi Pengembangan Budidaya Ikan di UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar				200.000.000		125.000.000		125.000.000		325.000.000		325.000.000		1.100.000.000			

				3.Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)				25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		140.000.000		
				4.Pengembangan Perikanan pada Kawasan Budidaya				113.490.000		220.000.000		220.000.000		250.000.000		250.000.000		1.053.490.000		
				5.Kawasan Pembenihan Ikan				-		250.000.000		170.000.000		250.000.000		250.000.000		920.000.000		
				6. Pelatihan dan Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok				60.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		1.060.000.000		
				7. Pengembangan Budidaya Ikan melalui Nganjuk Farming Development Center/ Agrotechnopark				200.000.000		500.000.000		500.000.000		400.000.000		400.000.000		2.000.000.000		
				8. Sosialisasi Program Nganjuk Farming Development Center dan Master Plan Budidaya Perikanan				-		75.000.000		-		-		-		75.000.000		
				9.Peningkatan Kelas Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)				20.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		180.000.000		
				10.Pelatihan Budidaya Ikan di Lahan Pekarangan untuk meningkatkan Gizi				-		100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		500.000.000		
				11.Bantuan Pengadaan Kolam dan Bibit Ikan (PIK)				-		250.000.000		-		-		-		250.000.000		

			12. Pelatihan Budidaya Ikan (PIK)						35.000.000									35.000.000		
				Jumlah ikan di konsumsi oleh masyarakat (Kg)	22,45	25,05	984.780.000	26,00	9.457.600.000	26,35	6.125.000.000	27,12	4.725.000.000	28,75	6.225.000.000	28,75	27.517.380.000			
			1. Gerakan Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan			300.000.000		500.000.000		400.000.000		500.000.000		500.000.000		2.200.000.000				
			2. Pendampingan Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			-		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		100.000.000				
			3. Restocking Waduk/Embung (Benih dan Peralatan Pasca Panen)			100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		900.000.000				
			4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil (DAK)			584.780.000		8.732.600.000		5.500.000.000		4.000.000.000		5.500.000.000		24.317.380.000				
		Jumlah kelompok pembudidaya ikan	8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)		0	0		25 Kelompok	200.000.000	25 Kelompok	250.000.000	25 Kelompok	250.000.000	25 Kelompok	250.000.000	25 Kelompok	950.000.000			
			Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat			-		200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		950.000.000				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan, dapat dilihat pada tabel VII.1 berikut :

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

NO	INDIKATOR
A	KETAHANAN PANGAN
1.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
B	PERIKANAN
1.	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB

7.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicators* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut :

Tabel VII.2
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR
A	KETAHANAN PANGAN
1. 2.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
B	PERIKANAN
1. 2.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya (Ton) Jumlah Ikan dikonsumsi oleh masyarakat (Kg)

VII.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel VII.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
			Th - 0 2018	Th - 1 2019	Th - 2 2020	Th - 3 2021	Th - 4 2022	Th - 5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	09	10
1.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	88,9 %	90,5 %	92,1 %	93,7 %	95,3 %	96,8 %	
2.	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Kelautan dan Perikanan ----- x 100 % Jumlah PDRB	4,20						

VII.4. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Tabel VII.4
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
			Th - 0 2018	Th-1 2019	Th-2 2020	Th-3 2021	Th-4 2022	Th-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	1. Rata2 Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg) $\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	317,4	317,8	318,3	318,8	319,3	319,7	319,7
2.	Ketersediaan Energi dan protein perkapita	2. Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari) : $\frac{\text{Ketersediaan Pangan/kapita/hari} \times \text{kandungan kalori} \times \text{BDD}}{100}$	4.490	4.010	3.530	3.049	2.569	2.089	2.089
		Ketersediaan protein (gram/protein/hari) : $\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari} \times \text{kandungan kalori BDD}}{100}$	195,1	172,7	150,3	128,0	105,6	83,2	83,2

1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya (Ton)	$\frac{\text{Jumlah produksi Ikan Budidaya (ton)}}{\text{Target Daerah (ton)}} \times 100\%$	11.785	11,820	11,835	11,844	11,858	11,871	11,871
		$\frac{\text{Jumlah produksi Ikan Non Budidaya (ton)}}{\text{Target Daerah (ton)}} \times 100\%$	656	674	655	666	678	668	668
2.	Jumlah Ikan dikonsumsi oleh masyarakat (Kg)	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Target Daerah (ton)}} \times 100\%$	22,45	25,05	26,00	26,35	27,12	28,75	28,75

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk. Rencana Strategis ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Rencana jangka menengah dalam Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lagi ke dalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk tahun 2018 hingga tahun 2023 dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di setiap tahun. Dengan demikian penjabaran Rencana Strategis ke dalam Renja SKPD atau dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK

Drh. BUDI SUTJAHJONO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620406 199202 1 001